

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah pusat mempunyai kewajiban untuk membangun pedesaan di Indonesia. Sebagai kita ketahui bahwa desa merupakan ujung tombak pembangunan nasional yaitu pembangunan Desa yang berkelanjutan menjadi prioritas nasional, sehingga pembangunan pada akhirnya akan dirasakan oleh masyarakat Desa tanpa ada yang terlewatkan. Bila desa masih tertinggal jangan berharap pembangunan nasional berjalan dengan baik, karena Indonesia sebagai besar berada di tingkat pedesaan. Oleh karena itu bila pembangunan nasional ingin dicapai maka pembangunan desalah yang harus diutamakan. Tedak heran jika pemerintah pusat mengeluarkan dana berupa bantuan untuk desa yang kita kenal dana bantuan dasa.

Sekarang ini problem baru timbul, dana desa itu harus dikelola dengan baik tetapi kenyataannya dana desa itu disalah gunakan oleh pemerintah dasa dan tidak jarang kita mendengar dana desa itu dipergunakan oleh kepala desa tidak untuk keperluan yang telah ditentukan.¹ Hal ini terjadi karena partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa kurang maksimal. Sejatinya, partisipasi itu melekat dalam pengelolaan dana desa dimulai dari peruntukan dana desa itu seharusnya direncanakan oleh pemerintah desa bersama-sama dengan masyarakat desa.

Seharusnya, dana itu dikemukakan apabila ada persetujuan masyarakat tempat persetujuan masyarakat maka penggunaan dana desa itu menjadi temuan. Apabila demikian pengelolaan dana desa itu maka sudah pasti tercipta partisipasi masyarakat dan pembangunan ekonomi masyarakat desa pun dapat terwujud adanya. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan.

¹ Arumdani, N., & Kriswibowo, A. (2022). Model Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Dadapan Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 8(2), 214-221.

Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan pontesi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal. Demikian juga halnya terkait dengan partisipasi masyarakat terhadap penggunaan dan pengelolaan dana desa, keterlibatan ini penting agar penggunaan dan pengelolaannya bisa lebih tepat sasaran dan manfaatnya akan lebih mengenai dengan kepentingan nyata dari masyarakat. Namun yang terjadi di Desa Singkuang II Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal dalam hal penggunaan dan pengelolaan dana desa masih minim terkait dengan keterlibatan atau partisipasi masyarakat setempat.

Hal ini berpengaruh terhadap dukungan masyarakat terhadap berbagai program yang akan dijalankan dengan menggunakan dana desa. Hal ini tentu saja akan menghentikan persyaratan dalam pengelolaan dana desa yang sudah di atur dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang sudah mengatur tentang bagaimana mengelola dan penggunaan dana desa.

Terdapat beberapa factor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa seperti kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa mengenai program dana desa sehingga masyarakat kurang paham tentang program dana desa tersebut, itu yang membuat masyarakat kurang berpartisipasi². Selain itu faktor pendidikan masyarakat Desa Singkuang II yang masih kurang, sehingga masyarakat sulit untuk memahami segala aktifitas yang dilakukan oleh orang lain dalam masyarakat.

Permasalahan yang sering terjadi bahwa pengelolaan dana desa minim partisipasi masyarakat sehingga dana desa yang sebelumnya untuk membangun ekonomi masyarakat tidak tercapai yang terjadi menimbulkan gap antara pengelola keuangan dana desa dengan masyarakat. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah partisipasi masyarakat di Desa Singkuang II dalam pengelolaan

² Elsi, S. D., & Bafadhal, F. (2019). Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Bumdes Di Desa Tanjung Lanjut Sekernan Muaro Jambi. *Rambideun: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 33-37.

dana desa sudah terlaksana dengan baik. Maka penelitian akan mengangkat topik penelitian yang berjudul “Partisipasi masyarakat pada bidang ekonomi pasca dana desa di Desa Singkuang II Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah bagian dari pertanyaan yang akan dijawab melalui pengumpulan data dari penelitian. Dengan demikian rumusan masalah menampilkan tantangan dan kesulitan yang timbul dan harus diatasi dengan beberapa solusi dan alternatif pemecahan masalah, sehingga tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai sebagaimana mestinya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang diajukan pada penelitian ini yaitu bagaimana partisipasi masyarakat pada bidang ekonomi pasca bantuan dana desa di Desa Singkuang II kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal?

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, perlu adanya pembatasan masalah agar cakupan permasalahan yang lebih fokus. Adapun fokus yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat pada bidang ekonomi pasca bantuan dana desa di Desa Singkuang II Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal. Sehingga dengan pembatasan masalah ini hasil penelitian bisa sesuai dengan judul penelitian.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu hal yang akan dicapai dalam suatu kegiatan, dan setiap penelitian haruslah memiliki arah dan tujuan yang jelas. Tanpa adanya arah dan tujuan yang jelas, maka penelitian tidak akan berjalan dan mendapat hasil sebagaimana yang diharapkan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat pada bidang ekonomi pasca bantuan dana desa (studi di desa Singkuang II kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal).

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi serta informasi dalam menambah pengetahuan dan acuan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang dan mampu memperkaya ilmu administrasi.

2. Manfaat praktis

a. Bagi pemerintahan

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah Desa Singkuang II kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal) dalam menurunkan angka kemiskinan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bisa dijadikan masyarakat sebagai informasi dan bahan edukasi dalam partisipasi masyarakat.

c. Bagi peneliti

Manfaat yang di dapatkan peneliti dari penelitian ini yaitu pengetahuan dan pengalaman baru tentang dana desa dan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana.

d. Bagi FISIP UISU

Bermanfaat dalam mengembangkan materi pengajaran, mendukung pengabdian masyarakat dan meningkatkan reputasi fakultas melalui hasil dari penelitian yang berpengaruh terhadap masyarakat luas.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Teori Penelitian

Menurut Sugiyono (2018:81), teori penelitian adalah alur logika penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan prosisi yang disusun secara sistematis. Secara umum, teori mempunyai tiga fungsi, yaitu untuk menjelaskan (explanation), meramalkan (prediction), dan pengendalian (control)³. Dalam BAB II ini akan ada beberapa teori yang dibahas sebagai berikut:

2.1.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upayamengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Beberapa dimensi dalam teori partisipasi masyarakat menurut Isbandi termasuk:

1. Keterlibatan Aktif: Masyarakat diharapkan tidak hanya sebagai penerima kebijakan atau program, tetapi juga aktif dalam memberikan masukan, berpartisipasi dalam diskusi, dan terlibat dalam implementasi.
2. Transparansi dan Akses Informasi: Keterbukaan informasi dan akses yang mudah terhadap kebijakan, prosedur, dan keputusan menjadi kunci untuk mendorong partisipasi masyarakat yang efektif.
3. Keadilan dan Kesetaraan: Partisipasi masyarakat harus dilakukan secara adil, di mana semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat tanpa diskriminasi.
4. Penguatan Kapasitas: Masyarakat perlu diberdayakan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan keputusan.

³ Sugiyono, "Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), hal 54.

5. Pentingnya Konteks Lokal: Partisipasi masyarakat harus disesuaikan dengan konteks lokal dan budaya yang ada, menghormati nilai-nilai serta struktur sosial yang ada.

Adapun penjabaran mengenai dimensi teori partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007:27) sebagai berikut:

1. Keterlibatan aktif masyarakat dalam partisipasi merujuk pada peran serta aktif individu atau kelompok dalam berbagai tahap suatu proses atau program, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Partisipasi aktif menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek dari program pembangunan, tetapi juga berperan sebagai subjek yang memiliki suara dan pengaruh dalam pengambilan keputusan.

Beberapa bentuk keterlibatan aktif masyarakat dalam partisipasi meliputi:

- a. Pengambilan Keputusan: Masyarakat terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan, seperti dalam merumuskan tujuan, menentukan prioritas, dan menetapkan strategi untuk program yang akan dilakukan.
- b. Perencanaan: Keterlibatan masyarakat dalam merencanakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan pembangunan. Mereka dilibatkan dalam menyusun rencana aksi, menetapkan sumber daya, dan mengidentifikasi kebutuhan yang harus dipenuhi.
- c. Pelaksanaan Program: Masyarakat ikut serta dalam menjalankan program. Mereka tidak hanya menerima manfaat, tetapi juga aktif berkontribusi melalui tenaga, waktu, atau sumber daya lain dalam pelaksanaan program tersebut.
- d. Pengawasan dan Evaluasi: Masyarakat dilibatkan dalam memantau dan menilai jalannya program. Mereka memberikan umpan balik, kritik, serta saran perbaikan berdasarkan pengalaman langsung selama pelaksanaan program.
- e. Pemberdayaan: Partisipasi aktif juga berarti masyarakat diberdayakan untuk memiliki kontrol atas program tersebut, termasuk pengambilan keputusan yang berkelanjutan. Dengan diberdayakan, masyarakat dapat

mempertahankan program atau inisiatif tersebut secara mandiri di masa depan.

Ciri-ciri keterlibatan aktif masyarakat antara lain:

- a. Inklusif: Semua lapisan masyarakat dilibatkan tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau pendidikan.
 - b. Bersifat Kolaboratif: Keterlibatan dilakukan melalui kerja sama antara masyarakat dengan pihak luar, seperti pemerintah, LSM, atau sektor swasta.
 - c. Transparan dan Terbuka: Informasi disampaikan secara jelas, dan masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka.
 - d. Partisipatif secara Proaktif: Masyarakat bukan hanya diminta partisipasinya, tetapi mereka juga secara proaktif menawarkan diri untuk terlibat dalam kegiatan.
 - e. Keterlibatan aktif ini sangat penting dalam menjamin keberhasilan program pembangunan, karena masyarakat yang terlibat memiliki rasa kepemilikan terhadap hasil dari program tersebut dan lebih berkomitmen untuk mendukung keberlanjutannya.
2. Transparansi dan akses informasi merupakan dua elemen penting dalam partisipasi masyarakat yang efektif. Keduanya memastikan bahwa masyarakat dapat berperan aktif dan memiliki pemahaman yang jelas tentang proses yang mereka ikuti. Berikut adalah penjelasan mengenai pentingnya transparansi dan akses informasi dalam partisipasi masyarakat:

a. Transparansi

Transparansi berarti terbukanya proses pengambilan keputusan, kebijakan, dan informasi terkait dengan program atau kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam konteks partisipasi masyarakat, transparansi mencakup:

1. Kejelasan Proses: Masyarakat harus diberitahu secara terbuka tentang bagaimana suatu program dirancang, siapa yang terlibat, sumber dana yang digunakan, dan apa hasil yang diharapkan.

2. Akuntabilitas: Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program (seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, atau pihak swasta) harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, termasuk dalam penggunaan dana, pelaksanaan kegiatan, dan capaian program.
3. Keputusan yang Jelas: Setiap keputusan yang diambil harus dapat dijelaskan kepada masyarakat dengan alasan yang mendasarinya, sehingga masyarakat mengerti kenapa suatu tindakan atau kebijakan diambil.
4. Pengelolaan yang Jujur: Transparansi juga berarti tidak ada penutupan atau penyembunyian informasi penting yang relevan dengan kepentingan publik, sehingga masyarakat dapat mempercayai proses yang sedang berlangsung.

b. Akses Informasi

Akses informasi berarti memberikan masyarakat kesempatan untuk memperoleh data dan informasi yang mereka butuhkan untuk memahami dan terlibat dalam proses pembangunan. Beberapa poin penting terkait akses informasi adalah:

1. Ketersediaan Informasi: Informasi harus disediakan secara terbuka, mudah diakses, dan dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat, termasuk data tentang perencanaan, pelaksanaan, dan hasil program.
2. Ketersediaan Saluran Informasi: Saluran informasi harus ada dan dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat, misalnya melalui media cetak, media elektronik, pertemuan publik, atau media sosial.
3. Transparansi Anggaran: Masyarakat harus dapat mengetahui bagaimana anggaran digunakan, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaannya. Hal ini untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan.
4. Partisipasi dalam Proses Informasi: Masyarakat harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam mencari, memberi, atau

bahkan menghasilkan informasi yang relevan dengan program pembangunan.

5. Pendampingan dalam Memahami Informasi: Dalam beberapa kasus, masyarakat mungkin memerlukan pendampingan atau pendidikan tentang bagaimana mengakses dan memahami informasi yang disediakan, terutama di komunitas yang kurang terpapar teknologi atau literasi informasi.

Pentingnya Transparansi dan Akses Informasi dalam Partisipasi Masyarakat, meningkatkan Kepercayaan: Ketika informasi tersedia dan prosesnya transparan, masyarakat lebih percaya kepada pihak penyelenggara program dan lebih bersedia untuk terlibat aktif. Mendorong Akuntabilitas: Transparansi dan akses informasi memungkinkan masyarakat untuk memantau jalannya program dan menuntut akuntabilitas jika terjadi penyimpangan. Meningkatkan Efektivitas Program: Dengan keterlibatan aktif berdasarkan informasi yang akurat, masyarakat dapat memberikan masukan yang lebih tepat, sehingga program lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Meminimalkan Konflik: Keterbukaan informasi dapat mengurangi kesalahpahaman dan potensi konflik karena semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan proses yang sedang berlangsung.

Secara keseluruhan, transparansi dan akses informasi memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara bermakna dalam setiap tahap program pembangunan, dari perencanaan hingga evaluasi, serta memastikan bahwa program tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka.

3. Keadilan dan kesetaraan dalam partisipasi masyarakat merupakan prinsip-prinsip penting untuk memastikan bahwa setiap individu atau kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses pembangunan, tanpa adanya diskriminasi atau ketidakadilan. Prinsip-prinsip ini mendukung terciptanya partisipasi yang inklusif dan representatif dari seluruh lapisan masyarakat.

Keadilan dalam Partisipasi Masyarakat Keadilan dalam partisipasi masyarakat berarti bahwa setiap orang mendapatkan kesempatan yang adil untuk terlibat dalam proses pembangunan, tanpa dipengaruhi oleh status sosial,

ekonomi, jenis kelamin, etnis, agama, atau karakteristik lainnya. Hal ini mencakup:

1. Akses yang Sama Terhadap Informasi dan Kesempatan: Semua individu harus memiliki akses yang setara terhadap informasi yang relevan dengan program pembangunan serta kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.
2. Pengakuan Terhadap Kebutuhan Khusus: Keadilan juga berarti mengakui bahwa kelompok-kelompok tertentu mungkin membutuhkan dukungan atau akses yang lebih untuk berpartisipasi. Misalnya, masyarakat yang terpinggirkan atau minoritas mungkin perlu mendapatkan perhatian lebih untuk memastikan mereka dapat terlibat secara efektif.
3. Distribusi Manfaat yang Adil: Program atau kebijakan pembangunan harus memastikan bahwa manfaat dari partisipasi dibagikan secara adil di seluruh lapisan masyarakat. Tidak boleh ada kelompok yang dirugikan atau ditinggalkan.
4. Pemberian Ruang untuk Perbedaan: Keadilan dalam partisipasi juga mencakup pemberian ruang bagi berbagai pandangan, latar belakang, dan kepentingan. Semua suara, termasuk dari kelompok yang paling lemah, harus didengar dan dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

Kesetaraan dalam Partisipasi masyarakat kesetaraan dalam partisipasi masyarakat menekankan bahwa setiap orang, tanpa memandang latar belakang atau statusnya, memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Kesetaraan ini berarti menghilangkan hambatan-hambatan yang mungkin menghalangi keterlibatan beberapa kelompok dalam partisipasi. Kesetaraan dapat dicapai melalui:

1. Keterlibatan Semua Kelompok: Kesetaraan menuntut bahwa baik pria maupun wanita, masyarakat miskin maupun kaya, serta kelompok mayoritas dan minoritas, semuanya memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam proses partisipasi.
2. Menghapus Diskriminasi: Kesetaraan menuntut penghapusan segala bentuk diskriminasi dalam akses ke partisipasi. Hal ini bisa berupa diskriminasi

berdasarkan gender, kelas sosial, atau etnisitas yang menghalangi kelompok tertentu untuk terlibat secara penuh.

3. Akses Sumber Daya yang Setara: Setiap orang harus memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, seperti pelatihan, informasi, atau kesempatan untuk terlibat dalam proses pembangunan. Jika sumber daya ini tidak dibagikan secara merata, maka kesetaraan dalam partisipasi sulit dicapai.
4. Kesempatan untuk Menjadi Pemimpin: Kesetaraan juga berarti memberi setiap orang kesempatan yang sama untuk mengambil peran kepemimpinan dalam kegiatan partisipasi, tanpa memandang latar belakang sosial, budaya, atau ekonomi mereka.

Pentingnya Keadilan dan Kesetaraan dalam Partisipasi Masyarakat berdasarkan:

1. Inklusivitas: Keadilan dan kesetaraan memastikan bahwa seluruh kelompok dalam masyarakat merasa terlibat dan berkontribusi dalam proses pembangunan. Hal ini penting untuk menghindari ketidakpuasan atau konflik akibat ketidakadilan atau ketimpangan dalam partisipasi.
2. Peningkatan Efektivitas Program: Partisipasi yang adil dan setara akan mencerminkan berbagai perspektif dan kebutuhan yang berbeda dalam masyarakat, sehingga program pembangunan lebih relevan dan efektif dalam menjawab kebutuhan seluruh komunitas.
3. Menciptakan Rasa Kepemilikan: Ketika masyarakat merasa bahwa prosesnya adil dan mereka memiliki kesempatan yang setara, mereka cenderung merasa memiliki program tersebut dan berkomitmen untuk mendukung keberhasilannya.
4. Mengurangi Kesenjangan Sosial: Keadilan dan kesetaraan dalam partisipasi membantu mengurangi kesenjangan sosial dengan memberdayakan kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan memberikan mereka suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan.

Secara keseluruhan, keadilan dan kesetaraan dalam partisipasi masyarakat adalah kunci untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, di

mana semua anggota masyarakat berperan aktif dan mendapatkan manfaat yang setara dari hasil pembangunan.

4. Penguatan kapasitas dalam partisipasi masyarakat adalah proses membangun kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan oleh individu, kelompok, atau komunitas untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses pembangunan. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya dapat terlibat secara pasif, tetapi juga mampu mengambil peran yang lebih aktif dan bermakna dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pembangunan.

Elemen-Elemen Penguatan Kapasitas dalam Partisipasi Masyarakat terdiri dari:

1. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan: Masyarakat sering kali membutuhkan peningkatan pengetahuan tentang isu-isu pembangunan yang relevan, serta keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif. Misalnya, mereka dapat dilatih dalam perencanaan, manajemen proyek, advokasi, atau pemantauan dan evaluasi program.
2. Akses terhadap Sumber Daya: Penguatan kapasitas juga mencakup menyediakan akses yang lebih baik terhadap sumber daya yang dibutuhkan masyarakat, seperti informasi, teknologi, fasilitas, atau dukungan finansial. Ini memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dengan lebih baik dan mengambil inisiatif dalam mengelola proyek-proyek pembangunan.
3. Pemberdayaan Organisasi Masyarakat: Kapasitas masyarakat dapat diperkuat melalui pengembangan organisasi masyarakat (seperti kelompok swadaya, koperasi, atau asosiasi masyarakat). Organisasi-organisasi ini bisa menjadi sarana bagi masyarakat untuk berkumpul, berbagi pengetahuan, dan bertindak secara kolektif.
4. Peningkatan Kepemimpinan dan Manajemen: Kepemimpinan yang efektif dalam komunitas sangat penting untuk memastikan keberhasilan partisipasi. Melalui penguatan kapasitas, para pemimpin masyarakat dapat diberi pelatihan dan dukungan untuk mengelola konflik, memimpin pertemuan, serta membuat keputusan yang tepat berdasarkan konsensus.

5. Pengembangan Kepercayaan Diri dan Kemandirian: Penguatan kapasitas juga melibatkan upaya untuk meningkatkan rasa percaya diri masyarakat dalam berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan. Dengan meningkatnya kepercayaan diri, masyarakat lebih mampu mengadvokasi kepentingan mereka, mengambil peran dalam pengambilan keputusan, dan menjadi lebih mandiri.
6. Membangun Jaringan dan Kemitraan: Penguatan kapasitas juga mencakup pengembangan jaringan dan kemitraan dengan pihak luar, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), akademisi, dan sektor swasta. Jaringan ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses lebih banyak sumber daya dan dukungan untuk memperkuat partisipasi mereka.
7. Peningkatan Kesadaran Hak dan Kewajiban: Penguatan kapasitas berarti membantu masyarakat memahami hak-hak mereka sebagai warga negara serta kewajiban mereka dalam konteks pembangunan. Dengan pemahaman ini, mereka lebih mampu menuntut akuntabilitas dari pihak yang berwenang dan lebih aktif dalam memperjuangkan kepentingan mereka.

Manfaat Penguatan Kapasitas dalam Partisipasi Masyarakat antara lain:

1. Meningkatkan Partisipasi yang Berkualitas: Dengan memperkuat kapasitas, masyarakat menjadi lebih mampu berpartisipasi secara efektif dalam proses pembangunan, baik dalam merencanakan, melaksanakan, maupun mengevaluasi program-program yang berdampak pada mereka.
2. Mendorong Kemandirian Masyarakat: Penguatan kapasitas membantu masyarakat untuk mandiri dalam menjalankan program atau proyek pembangunan. Mereka tidak lagi tergantung sepenuhnya pada pihak luar, tetapi mampu mengelola sumber daya dan mengambil keputusan sendiri.
3. Mengatasi Hambatan Partisipasi: Banyak masyarakat yang mungkin merasa tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan yang cukup untuk berpartisipasi. Dengan memperkuat kapasitas mereka, hambatan-hambatan ini dapat diatasi, sehingga partisipasi menjadi lebih inklusif.
4. Meningkatkan Keberlanjutan Program: Ketika kapasitas masyarakat diperkuat, program pembangunan memiliki peluang lebih besar untuk berkelanjutan. Masyarakat yang memiliki keterampilan dan sumber daya

yang cukup cenderung lebih mampu menjaga keberlangsungan program setelah dukungan eksternal berakhir.

5. Menciptakan Kepemimpinan Lokal yang Kuat: Penguatan kapasitas dapat membantu menciptakan pemimpin-pemimpin lokal yang mampu mengarahkan masyarakat mereka menuju pembangunan yang lebih baik. Kepemimpinan yang kuat ini juga dapat membantu memfasilitasi dialog antara masyarakat dan pihak berwenang.

Contoh Penguatan Kapasitas dalam Partisipasi Masyarakat adalah:

1. Pelatihan Pengelolaan Proyek: Masyarakat diberi pelatihan tentang bagaimana mengelola proyek pembangunan, termasuk perencanaan, penganggaran, dan pemantauan.
2. Program Literasi dan Edukasi: Di beberapa komunitas, program literasi dasar dan edukasi tentang hak-hak warga negara diadakan untuk meningkatkan kapasitas partisipasi masyarakat.
3. Pengembangan Keterampilan Teknis: Dalam program pembangunan ekonomi, misalnya, masyarakat dapat dilatih keterampilan teknis yang diperlukan untuk mengembangkan usaha atau proyek mereka, seperti keterampilan kerajinan, pengelolaan pertanian, atau teknologi informasi.

Penguatan kapasitas dalam partisipasi masyarakat merupakan langkah yang krusial untuk memastikan bahwa masyarakat dapat berperan aktif dalam proses pembangunan. Dengan membekali mereka dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang diperlukan, penguatan kapasitas memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dengan lebih bermakna, mandiri, dan berkelanjutan. Ini juga berkontribusi pada pembangunan yang lebih inklusif dan adil, di mana semua lapisan masyarakat dapat terlibat dan mendapatkan manfaat.

- E. Konteks lokal memainkan peran yang sangat penting dalam partisipasi masyarakat karena setiap komunitas memiliki karakteristik, kebutuhan, dan dinamika sosial yang unik. Menyadari dan memahami konteks lokal memungkinkan program pembangunan untuk lebih efektif, relevan, dan diterima oleh masyarakat. Berikut adalah beberapa alasan mengapa konteks lokal sangat penting dalam partisipasi masyarakat:

1. Pemahaman yang Mendalam tentang Kebutuhan dan Masalah Lokal

Konteks lokal membantu dalam memahami masalah dan kebutuhan spesifik yang dihadapi oleh masyarakat. Apa yang menjadi prioritas di satu komunitas mungkin berbeda dengan komunitas lain. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat yang memperhitungkan konteks lokal memungkinkan program pembangunan untuk menyoroti kebutuhan yang nyata dan mendesak, merumuskan solusi yang relevan dengan kondisi kehidupan masyarakat setempat.

2. Penyesuaian terhadap Budaya dan Nilai Sosial

Setiap komunitas memiliki norma, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya yang memengaruhi cara mereka berinteraksi dan berpartisipasi. Memperhatikan konteks lokal membantu dalam menghormati budaya setempat sehingga masyarakat merasa nyaman untuk terlibat, mencegah konflik budaya atau sosial yang dapat timbul akibat pendekatan partisipasi yang tidak sesuai dengan tradisi lokal, mengoptimalkan penggunaan nilai-nilai lokal seperti gotong royong dalam mendorong partisipasi.

3. Penggunaan Sumber Daya Lokal

Konteks lokal memungkinkan program pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia di lingkungan masyarakat tersebut. Ini dapat mencakup penggunaan sumber daya alam yang ada secara berkelanjutan, melibatkan keterampilan dan pengetahuan lokal yang sudah berkembang, memberdayakan institusi dan organisasi masyarakat setempat dalam pelaksanaan program.

4. Pemberdayaan dan Kemandirian Masyarakat

Ketika partisipasi masyarakat didasarkan pada konteks lokal, hal ini dapat memperkuat pemberdayaan masyarakat karena Masyarakat lebih memahami dan merasa memiliki program tersebut karena sesuai dengan realitas hidup mereka. Program menjadi lebih berkelanjutan karena masyarakat dapat mengelola dan melanjutkannya dengan pengetahuan dan sumber daya yang sudah mereka miliki.

5. Adaptasi terhadap Kondisi Lingkungan Fisik dan Ekonomi

Konteks lokal juga mencakup kondisi fisik (seperti iklim, topografi) dan kondisi ekonomi (seperti sumber penghasilan utama, akses terhadap pasar). Dengan memahami ini, partisipasi masyarakat dapat diarahkan untuk Menyusun program yang sesuai dengan keadaan lingkungan, misalnya pendekatan yang lebih adaptif terhadap risiko bencana alam atau kelangkaan sumber daya. Memaksimalkan potensi ekonomi lokal melalui partisipasi dalam proyek yang relevan dengan mata pencaharian masyarakat.

6. Memperkuat Kohesi Sosial

Partisipasi yang menghargai konteks lokal dapat memperkuat kohesi sosial dengan cara Menggunakan pendekatan yang sesuai dengan struktur sosial dan sistem kepemimpinan tradisional. Melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang biasanya terpinggirkan dalam konteks lokal, seperti perempuan, minoritas etnis, atau kelompok rentan lainnya.

7. Meningkatkan Penerimaan dan Komitmen Masyarakat

Jika program pembangunan dirancang dengan memperhatikan konteks lokal, masyarakat cenderung lebih menerima dan berkomitmen terhadap program tersebut karena Mereka merasa bahwa program tersebut dibuat dengan mempertimbangkan situasi dan kebutuhan mereka. Partisipasi mereka diakui sebagai sesuatu yang berharga dalam konteks komunitas mereka sendiri, yang meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil program.

8. Menghormati Sistem Kepemimpinan Lokal

Dalam banyak komunitas, ada struktur kepemimpinan tradisional atau informal yang sangat dihormati. Memahami dan bekerja dengan sistem kepemimpinan lokal dapat Membantu mengarahkan partisipasi masyarakat dengan cara yang lebih efektif, karena keputusan yang didukung oleh pemimpin lokal lebih mungkin diterima oleh seluruh komunitas. Membangun rasa saling percaya antara masyarakat dan pihak eksternal yang terlibat dalam program.

Memahami konteks lokal sangat penting dalam memastikan bahwa partisipasi masyarakat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kondisi unik dari

setiap komunitas. Program yang menghargai konteks lokal tidak hanya lebih relevan dan berkelanjutan, tetapi juga lebih inklusif dan adil. Dengan memperhitungkan aspek budaya, sosial, ekonomi, dan lingkungan setempat, partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan dan hasil pembangunan yang dicapai akan lebih efektif serta bermanfaat bagi seluruh anggota masyarakat.

Partisipasi adalah Wazir (1999) menggambarkan partisipasi murni dalam interaksi sosial yang terjadi dalam setting tertentu. Di sisi lain, “proses evaluasi perubahan yang terjadi melalui keterlibatan anggota masyarakat” adalah bagaimana Muslimin (2012) mencirikan “partisipasi masyarakat”. Partisipasi dalam masyarakat memerlukan kegiatan seperti membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan peluang penduduk lokal, memilih solusi yang layak dari kumpulan opsi, dan menerapkan opsi tersebut ke dalam tindakan.

Dalam bukunya Naimah (2017), Conyers membuat perbedaan antara dua bentuk partisipasi warga negara yang berbeda: Pertama, ada masalah keterlibatan dalam pengambilan keputusan, yang memerlukan identifikasi bagaimana individu dapat berkolaborasi secara efektif satu sama lain untuk memastikan arah dan arah yang berkelanjutan. pertumbuhan bangsanya. kedua, partisipasi dalam pelaksanaan rencana yang sebenarnya. Partisipasi ini berfungsi sebagai contoh bagaimana anggota komunitas dapat bekerja sama untuk memastikan keberhasilan suatu program. Kelima, partisipasi dalam proses memutuskan bagaimana sumber daya harus didistribusikan. Dari segi kualitas, seperti peningkatan produktivitas, dan dari segi kuantitas, seperti proporsi program yang berhasil.

Keempat, harus ada keterlibatan aktif dalam proses penilaian, dengan mengacu pada pelaksanaan acara yang komprehensif dan pengetahuan sukses terkait dengan perencanaan dan pencegahan kegagalan.

2.1.1.1 Faktor Penentu Tingkat Partisipasi Masyarakat

Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan dan penghasilan (Slamet, 1994:97). Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi (Slamet, 1994:137-143).

Sedangkan Menurut Plumer (2004:27), beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah:

1. Pengetahuan dan keahlian. Dasar pengetahuan yang dimiliki akan mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal ini membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan bentuk dari partisipasi yang ada;
2. Pekerjaan masyarakat. Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun waktunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi;
3. Tingkat pendidikan dan buta huruf. Faktor ini sangat berpengaruh bagi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada.
4. Jenis kelamin. Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda terhadap suatu pokok permasalahan;

5. Kepercayaan terhadap budaya tertentu. Masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang ada.

Dari pendapat diatas, dapat ditarik kesimpulan beberapa faktor penentu tingkat partisipasi masyarakat dalam suatu perencanaan pembangunan di daerah adalah:

1. Pendidikan

Menurut Khikmawati, (1997: 28) mengatakan bahwa mereka yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi akan lebih tinggi derajat partisipasinya dalam pembangunan.

Sedangkan menurut Plumer (dalam Suryawan, 2004:27) beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah pengetahuan dan keahlian, pekerjaan masyarakat, tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan kepercayaan terhadap budaya tertentu. Secara umum, masyarakat desa memiliki sumberdaya yang sangat terbatas.

Salah satu penyebabnya adalah rendahnya tingkat pendidikan di pedesaan. Oleh karena itu sosialisasi oleh pemerintah tentang pentingnya pendidikan bagi seluruh masyarakat harus sebanding dengan tersedianya sarana dan prasarana yang cukup untuk menunjang pendidikan terutama bagi masyarakat desa terpencil.

2. Pekerjaan

Menurut Angell dalam Ross, (1967), salah satu faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi adalah pekerjaan dan penghasilan yang dimiliki dan dianggap sudah dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Pendapatan rendah pada masyarakat di pedesaan merupakan realitas sosial yang terjadi saat ini. Pendapatan merupakan suatu aspek pokok dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. maka apabila pendapatan itu rendah banyak hal yang akan terkena dampak.

3. Jenis Kelamin

Angell dalam Ensiklopedia Wikipedia berjudul partisipasi (2011) mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu: usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan, lamanya tinggal Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

4. Latar Belakang Sosial Budaya Masyarakat

Tingkat heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan konsep-konsep yang ada.

2.1.2 Pengertian Ekonomi

Secara umum ekonomi ini memiliki pengertian sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Segala bentuk usaha dan upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut dalam rangka untuk mendapatkan kesejahteraan hidup. Walaupun nggak mutlak berpengaruh pada kebahagiaan hidup, kehidupan ekonomi yang baik akan menjadi bagian dari sumber kebahagiaan manusia.

Menurut Richard G. Lipsey, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang upaya pemanfaatan sumber daya yang terbatas dan langka dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang jumlahnya tanpa batas.

Menurut Richard G. Lipsey, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang upaya pemanfaatan sumber daya yang terbatas dan langka dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang jumlahnya tanpa batas.

Definisi ekonomi menurut Alfred Marshal adalah ilmu tentang usaha individu terkait pekerjaan dalam kehidupan dan membahas tentang bagaimana manusia meraih pendapatan sekaligus menggunakannya.

2.1.2.1 Prinsip Ekonomi Secara Umum

Adapun prinsip ekonomi yang dimaksud sebagai berikut:

1. Prinsip Produksi

Kegiatan produksi akan menghasilkan sebuah produk dan selanjutnya produk tersebut menjadi objek pemenuhan terhadap kebutuhan hidup manusia. Melakukan produksi adalah bagian dari prinsip ekonomi secara umum. Adanya produksi, selain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, juga untuk mendapatkan keuntungan yang besar, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi pengangguran dan lainnya.

2. Prinsip Distribusi

Proses untuk menyalurkan produk kepada pasar agar bisa memenuhi kebutuhan hidup manusia ini adalah maksud dari distribusi. Adanya distribusi ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil dari produksi bisa sampai ke konsumen dengan baik.

3. Prinsip Konsumsi

Prinsip ekonomi lainnya adalah konsumsi. Konsumsi adalah upaya untuk menggunakan produk berupa barang atau jasa. Inilah tujuan akhir dari ekonomi tersebut.

2.1.2.2 Ruang Lingkup Bidang Ekonomi

Ruang lingkup di bidang ekonomi dibagi menjadi berbagai macam yaitu:

1. Ekonomi Deskriptif

Ekonomi deskriptif adalah salah satu contoh ruang lingkup ekonomi deskriptif, di mana ilmu ekonomi mencakup penggunaan angka, kurva, grafik untuk melakukan analisa terhadap kondisi ekonomi di wilayah tertentu. Data yang ada menjadi cara untuk memahami kondisi dan situasi ekonomi yang sedang terjadi.

2. Teori Ekonomi

Teori ekonomi merupakan ilmu ekonomi yang menjelaskan hubungan sebab akibat, pengertian, dan cara kerja dari sistem ekonomi. Mencakup ekonomi makro dan mikro.

3. Ekonomi Terapan

Teori yang menjawab adanya sebab akibat plus solusi dari suatu masalah ekonomi merupakan bagian dari ekonomi terapan. Sebagai contoh ekonomi syariah, ekonomi politik, ekonomi pembangunan dan lainnya.

Ruang lingkup bidang ekonomi mencakup berbagai aspek dan subdisiplin yang menganalisis cara-cara manusia mengelola sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Secara umum, ekonomi dibagi menjadi dua kategori utama: ekonomi mikro dan ekonomi makro. Berikut adalah detail tentang ruang lingkup masing-masing kategori dan subdisiplin lainnya:

1. Ekonomi Mikro

Ekonomi mikro fokus pada perilaku individu dan perusahaan serta bagaimana mereka membuat keputusan mengenai alokasi sumber daya. Ruang lingkungannya meliputi:

- a. Teori Permintaan dan Penawaran: Analisis bagaimana harga dan kuantitas barang ditentukan di pasar berdasarkan interaksi antara permintaan konsumen dan penawaran produsen.
- b. Teori Produksi: Studi tentang bagaimana perusahaan menghasilkan barang dan jasa, termasuk analisis biaya dan output.
- c. Teori Biaya: Menilai bagaimana biaya produksi berubah seiring dengan tingkat produksi.
- d. Teori Pasar: Menganalisis berbagai bentuk pasar seperti persaingan sempurna, monopoli, monopsoni, dan oligopoli.

- e. Teori Pilihan Konsumen: Mempelajari bagaimana konsumen membuat keputusan tentang pembelian barang dan jasa berdasarkan preferensi dan anggaran.
- f. Teori Keseimbangan Umum: Meneliti bagaimana pasar yang berbeda berinteraksi dan mencapai keseimbangan secara bersamaan.
- g. Ekonomi Perilaku: Menganalisis bagaimana faktor psikologis dan sosial mempengaruhi keputusan ekonomi individu dan kelompok.

2. Ekonomi Makro

Ekonomi makro mempelajari perekonomian secara keseluruhan, termasuk masalah dan kebijakan yang mempengaruhi seluruh negara atau dunia. Ruang lingkupnya meliputi:

- a. Pertumbuhan Ekonomi: Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan peningkatan output nasional.
- b. Inflasi: Studi tentang penyebab, dampak, dan pengendalian inflasi dalam perekonomian.
- c. Pengangguran: Menganalisis berbagai jenis pengangguran, penyebabnya, dan kebijakan untuk menguranginya.
- d. Kebijakan Fiskal: Mempelajari pengaruh pengeluaran pemerintah dan perpajakan terhadap perekonomian.
- e. Kebijakan Moneter: Analisis pengaruh kebijakan bank sentral, seperti suku bunga dan jumlah uang beredar, terhadap perekonomian.
- f. Neraca Pembayaran: Studi tentang transaksi internasional dan dampaknya terhadap nilai tukar dan ekonomi domestik.
- g. Ekonomi Internasional: Mempelajari perdagangan internasional, investasi asing, dan dampak globalisasi terhadap ekonomi.

3. Ekonomi Pembangunan

Ekonomi pembangunan fokus pada proses dan kebijakan yang membantu negara-negara berkembang meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Ruang lingkupnya meliputi:

- a. Teori Pembangunan: Menganalisis proses pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktural dalam negara berkembang.

- b. Poverty and Inequality: Studi tentang kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi serta strategi untuk menguranginya.
- c. Perencanaan Pembangunan: Mempelajari metode dan strategi untuk merencanakan dan melaksanakan proyek pembangunan.
- d. Ekonomi Pertanian dan Pedesaan: Fokus pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan di sektor pertanian dan pedesaan.

4. Ekonomi Kesehatan

Ekonomi kesehatan menganalisis sistem kesehatan dan bagaimana sumber daya digunakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Ruang lingkupnya meliputi:

- a. Analisis Biaya-Manfaat: Mempelajari efisiensi dan efektivitas intervensi kesehatan.
- b. Ekonomi Asuransi Kesehatan: Menganalisis dampak asuransi kesehatan terhadap akses dan biaya perawatan kesehatan.
- c. Kebijakan Kesehatan: Studi tentang kebijakan yang mempengaruhi sistem kesehatan dan hasil kesehatan masyarakat.

5. Ekonomi Lingkungan

Ekonomi lingkungan mempelajari hubungan antara ekonomi dan lingkungan, termasuk bagaimana kegiatan ekonomi mempengaruhi lingkungan dan bagaimana kebijakan dapat mengelola dampak tersebut.

Ruang lingkupnya meliputi:

- a. Ekonomi Sumber Daya Alam: Menganalisis penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam seperti air, tanah, dan energi.
- b. Polusi dan Pengendalian: Studi tentang dampak polusi dan kebijakan untuk mengurangi emisi dan limbah.
- c. Ekonomi Perubahan Iklim: Mempelajari dampak perubahan iklim terhadap ekonomi dan kebijakan mitigasi serta adaptasi.

6. Ekonomi Perilaku

Ekonomi perilaku menggabungkan psikologi dengan ekonomi untuk memahami bagaimana keputusan ekonomi dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial. Ruang lingkupnya meliputi:

- a. Bias Kognitif: Analisis bagaimana bias dan kesalahan kognitif mempengaruhi keputusan ekonomi.
- b. Preferensi dan Pilihan: Studi tentang bagaimana preferensi dan perilaku individu beragam mempengaruhi ekonomi.

7. Ekonomi Industri

Ekonomi industri menganalisis struktur, perilaku, dan kinerja industri dan perusahaan. Ruang lingkupnya meliputi:

- a. Struktur Pasar: Studi tentang bagaimana struktur pasar mempengaruhi perilaku perusahaan dan kinerja industri.
- b. Strategi Perusahaan: Menganalisis strategi kompetitif dan keputusan bisnis yang mempengaruhi posisi pasar dan profitabilitas.

8. Ekonomi Institusi

Ekonomi institusi mempelajari peran institusi dalam menentukan hasil ekonomi. Ruang lingkupnya meliputi:

- a. Peran Institusi: Menganalisis bagaimana hukum, kebijakan, dan struktur institusi mempengaruhi kinerja ekonomi.
- b. Teori Institusi: Studi tentang bagaimana institusi berfungsi dan bagaimana mereka mempengaruhi perilaku ekonomi.

Ruang lingkup bidang ekonomi mencakup berbagai aspek dari perilaku individu dan perusahaan hingga kebijakan makroekonomi dan dampak lingkungan. Setiap subdisiplin memiliki fokus dan metodologi yang berbeda, tetapi semuanya berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana ekonomi berfungsi dan bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi hasil ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.3 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan alokasi khusus desa yang dialokasikan oleh pemerintah melalui pemerintah daerah (kabupaten). Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pembangunan tingkat desa baik pembangunan fisik maupun sumber daya manusia atau dengan kata lain alokasi dana desa dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan masyarakat.

Hal tersebut selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, yang mengatakan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Alokasi dana desa di Indonesia merupakan bagian dari strategi desentralisasi yang bertujuan untuk memberikan otonomi lebih besar kepada pemerintah desa dalam mengelola sumber daya untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut menjadi upaya untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang selama ini tinggal. Namun, untuk mencapai beberapa tujuan yang ada diperlukan pengelolaan yang efektif, transparan, dan partisipatif. Tantangan, seperti korupsi, kapasitas pengelolaan yang terbatas, dan rendahnya partisipasi masyarakat harus diatasi dengan kebijakan yang tepat dan dukungan yang memadai dari berbagai pihak.

2.1.3.1 Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau cash transfers adalah program pemerintah yang memberikan uang tunai atau berbagai bentuk bantuan lainnya kepada masyarakat miskin, baik dengan syarat tertentu (conditional cash transfer) maupun tanpa syarat (unconditional cash transfer).

Program BLT pertama kali diinisiasi oleh Brasil dan kemudian diadopsi oleh berbagai negara lainnya. Jumlah dana yang diberikan dan mekanisme pelaksanaan program BLT bervariasi tergantung kebijakan masing-masing pemerintah. Indonesia juga melaksanakan program BLT, yang meliputi pemberian bantuan tunai, pangan, jaminan kesehatan, dan pendidikan dengan sasaran pada tiga kelompok: hampir miskin, miskin, dan sangat miskin.

BLT pertama kali diterapkan pada tahun 2005, dilanjutkan pada tahun 2009, dan pada tahun 2013 namanya diubah menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program ini diselenggarakan sebagai tanggapan terhadap

kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia saat itu, dengan tujuan utama membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun program BLT dianggap berhasil oleh beberapa pihak, namun tetap menimbulkan kontroversi dan kritik.

2.1.3.2 Dana Stimulan

Dana Stimulan merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah daerah yang bertujuan sebagai pendorong untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Dana stimulan bersifat hibah bergulir, dana dimiliki oleh kelompok dan wajib dikelola untuk perguliran/dipinjamkan kepada anggota kelompok lain.

Realisasi penggunaan DPM dilaporkan pasca penerimaan DPM, sedangkan perkembangan DPM dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali/semesteran. Dana stimulan bertujuan untuk memotivasi desa agar aktif dalam melaksanakan aktivitas ataupun program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memperkuat kelembagaan desa, serta mempercepat proses pembangunan di wilayah desa.

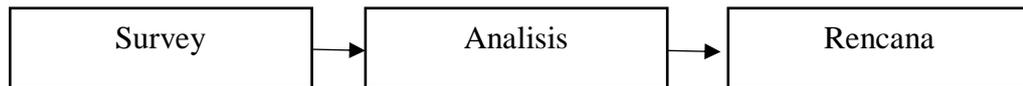
2.1.4 Partisipasi Masyarakat Desa Singkuang II

Beberapa hal yang dianggap penting untuk dibahas di dalam penelitian ini antara lain: Partisipasi selain telah menjadi kata kunci dalam pembangunan, juga menjadi salah satu karakteristik dari penyelenggaraan pemerintah yang baik. Secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa Inggris “participation” yang berarti mengambil bagian/keikutsertaan. Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia dijelaskan “partisipasi” berarti: hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta.

Secara umum pengertian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keperansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana rencanakegiatan yang akan

dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya. Melihat dampak penting dan positif dari perencanaan partisipatif, dengan adanya partisipasi masyarakat yang optimal dalam perencanaan diharapkan dapat membangun rasa kepemilikan yang kuat di kalangan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan yang ada.

Secara skematis struktur partisipasi dalam perencanaan seperti berikut:



Gambar 2. 1 Struktur Partisipasi Masyarakat

dikemukakan oleh Robert (dalam Soemarmo, 2005). Robert pada dasarnya sependapat dengan Geddes. Ia mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat pada dasarnya diperlukan sejak awal dalam perencanaan pembangunan.

Alexander Abe (2002 : 81) mengemukakan pengertian perencanaan partisipatif sebagai berikut: “perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan masyarakat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung maupun tidak langsung) tujuan dan cara harus dipandang sebagai satu kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat dan bila dirumuskan tanpa melibatkan masyarakat, maka akan sangat sulit dipastikan bahwa rumusan akan berpihak pada rakyat.” Lebih lanjut Abe mengemukakan langkah-langkah dalam perencanaan partisipatif yang disusun dari bawah yang dapat digambarkan sebagai tangga perencanaan.

Partisipasi masyarakat Desa Singkuang II dibidang ekonomi pasca dana desa mengalami kenaikan. Kenaikan partisipasi masyarakat juga dibarengi dengan meningkatnya jumlah penerima dana desa. Partisipasi masyarakat juga terkait pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Desa Singkuang II dimana masyarakat diminta untuk berpartisipasi dalam mengelola usaha sarang burung walet. Sebelum melakukan usaha tersebut masyarakat Desa Singkuang II dilakukan pemberdayaan agar masyarakat lebih paham dalam mengelola usaha sarang burung walet. Dibawah ini merupakan data partisipasi masyarakat yang terlibat dalam kegiatan dibidang ekonomi pasca dana desa sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.



Gambar 2. 2 Data Partisipasi Masyarakat

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian mengenai partisipasi masyarakat di bidang ekonomi pasca dana desa yang pernah dilakukan oleh:

A. Partisipasi Masyarakat Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sebagai Percepatan Pembangunan Desa Di Desa Tuban Kecamatan Gondangrejo.

Partisipan dalam penelitian adalah anggota masyarakat setempat di lokasi penelitian; mereka berjumlah sekitar lima orang dan terdiri dari penduduk pedesaan dan pemimpin masyarakat setempat. Teknik snowball sampling digunakan untuk memilih informasi yang relevan. Di sisi lain, saat menggunakan teknik ini, peneliti mencari data yang kredibel dengan mempertanyakan berbagai sumber dengan harapan akan mengarah pada temuan yang mereka butuhkan untuk menyelidiki mereka.

Metode pengumpulan data meliputi (1) pengamatan langsung di lokasi penelitian untuk mengukur partisipasi masyarakat; (2) wawancara mendalam dengan anggota masyarakat dan kepala desa dilakukan dengan menggunakan pertanyaan terbuka dan fokus untuk mendapatkan jawaban yang rinci; dan (3) penggunaan sumber sekunder yang ada untuk mengisi kekosongan data primer.

B. Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa

partisipasi masyarakat dalam mencegah korupsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di desa. Pengelolaan dana desa setelah diterbitkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengalami berbagai macam permasalahan diantara munculnya tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pencegahan tindak pidana korupsi, sehingga pemerintah desa diharapkan sebisa mungkin melakukan berbagai macam pencegahan terhadap tindak pidana korupsi baik itu dalam hal pengambilan kebijaksanaan, pengalokasian anggaran maupun dalam mekanisme pengambilan kebijakan.

Upaya peningkatan kesadaran Pejabat desa, butuh dilakukan penyuluhan alokasi dana desa dan tindak pidana korupsi. Rendahnya pemahaman serta kesadaran hukum dapat disebabkan oleh kurangnya tingkat sosialisasi dan penyuluhan. Rendahnya pemahaman serta kesadaran hukum dapat disebabkan oleh kurangnya tingkat sosialisasi dan penyuluhan, hal ini dapat dilihat dari tingginya tingkat korupsi diindonesia.

C. Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Nagari Dan Implikasinya Terhadap Partisipasi Masyarakat Di Nagari Bisati Kecamatan Vii Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemanfaatan dana desa, jenis dan jumlah infrastruktur yang dibangun serta jumlah dana yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan untuk mengetahui implikasi dengan adanya dana desa untuk pembangunan infrastruktur terhadap partisipasi masyarakat di Nagari Bisati kecamatan VII Koto Kabupaten Padang Pariaman.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus karena penelitian ini bertujuan untuk memahami objek yang ditelitinya dalam hal ini partisipasi masyarakat di nagari Bisati membangun infrastruktur nagari, khususnya jalan, jembatan dan irigasi setelah adanya dana desa yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur tersebut. Prosedur perolehan data penelitian kualitatif, dari studi kasus diperoleh dari wawancara, observasi dan arsip. Pengumpulan

data akan dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara/teknik yaitu untuk mendapatkan data primer akan dilakukan wawancara mendalam (Indepth interview) terhadap informan kunci.

Untuk mendapatkan data sekunder, akan digunakan teknik dokumentasi. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan Pengelolaan dan pemanfaatan dana desa di nagari Bisati sudah dilakukan dengan baik mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban yang diukur dari azas transparansi, akuntabilitas, partisipasi serta tertib dan disiplin memberikan hasil dan nilai yang baik. Proses perencanaan yang diawali dengan rembuk korong adalah salah satu cara untuk menjemput aspirasi masyarakat dari bawah (bottom up) merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Karena masyarakat itu sendiri yang tahu kebutuhannya, permasalahan dan kemampuannya.

Implikasi Pemanfaatan Dana Desa terhadap partisipasi masyarakat pada nagari Bisati sangat baik. Dengan adanya dana desa masyarakat lebih termotivasi untuk membangun. Hal ini dapat dilihat dengan masih banyaknya masyarakat yang menyumbangkan tanah mereka tanpa dibayar, tenaga, bahan material, makan dan minum, serta uang. Masyarakat di perantauan mengirimkan uang untuk pembelian bahan material. Istilah “badoncek” atau bersama-sama untuk menyumbangkan uang baik masyarakat yang berdomisili di kampung maupun diperantauan yang terkenal di Padang Pariaman masih terpelihara dengan baik terutama pada saat hari besar (lebaran).

D. Analisis Permasalahan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Dan Alokasi Dana Stimulan Pada Desa Rejosari, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang

Pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan multidimensi yang melibatkan upaya peningkatan ekonomi, akses pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, dan kebijakan sosial yang inklusif. Di Desa Rejosari, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, dua program utama yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan Dana Stimulan.

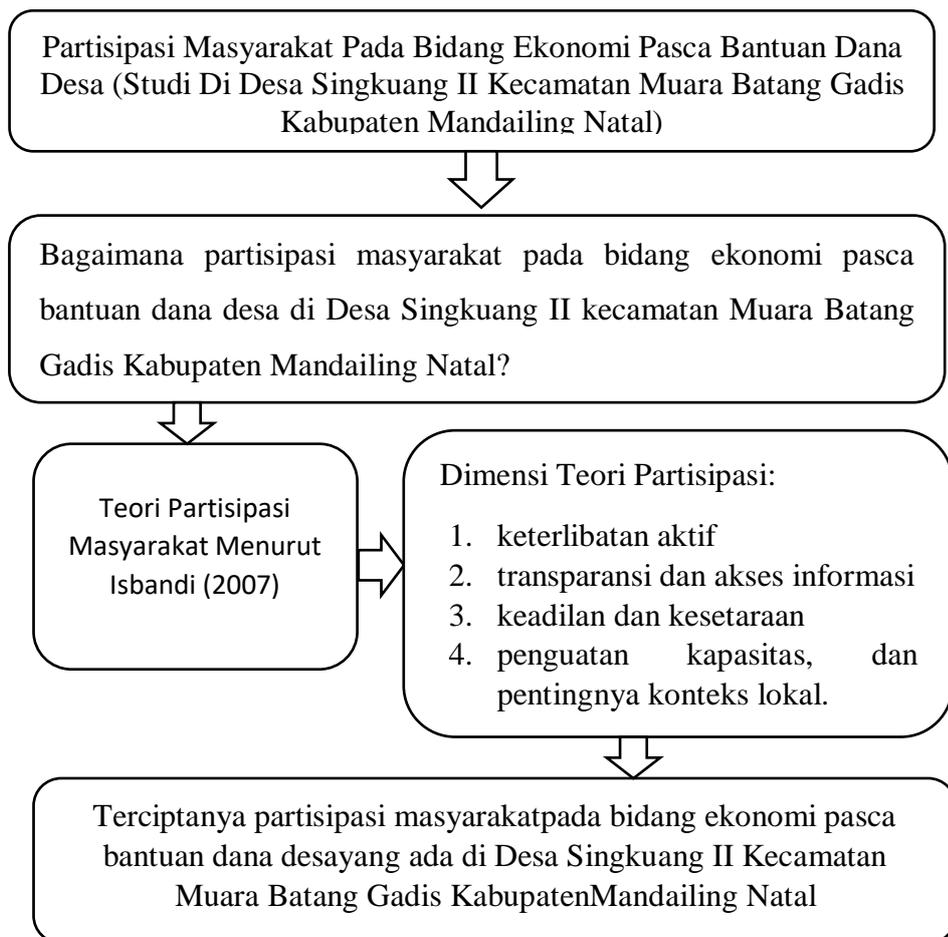
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif untuk mengkaji implementasi kedua program tersebut serta tantangan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan BLT-DD dan Dana Stimulan, termasuk ketidaktepatan sasaran penerima bantuan dan kecemburuan sosial di antara warga. Pendataan penerima bantuan yang kurang valid mengakibatkan distribusi bantuan tidak tepat sasaran, dan penggunaan Dana Stimulan yang tidak maksimal oleh penerima menyebabkan tidak tercapainya tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulannya, perbaikan dalam sistem pendataan, transparansi, pengawasan, dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan di Desa Rejosari.

Saran yang diajukan meliputi peningkatan validitas data penerima bantuan, pengawasan yang lebih ketat terhadap distribusi dana, dan edukasi kepada penerima manfaat mengenai penggunaan dana yang efektif untuk pengembangan usaha atau kegiatan positif di desa.

2.3 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir biasanya juga disebut kerangka konseptual. Kerangka berfikir merupakan uraian atau pernyataan mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka berfikir juga diartikan sebagai penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Disamping itu, ada pula yang berpendapat bahwa kerangka berfikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting⁴. Adapun kerangka berfikir penelitian ini dapat dari beberapa tahapan sebagai berikut:

⁴ Suyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)* Bandung : Alfabeta, 2013), h. 60.



Gambar 2. 3 Kerangka Berpikir